

KONSEKUENSI PELABELAN TERORIS TERHADAP KELOMPOK
BERSENJATA DI PAPUA: PERSPEKTIF SUBJEK HUKUM
INTERNASIONAL

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

Wayne Adventino William Ansanay

NIM : 21.C1.0125

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Pelabelan kelompok bersenjata di Papua sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks. Di satu sisi, pelabelan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat legitimasi negara dalam menegakkan keamanan nasional; namun di sisi lain, menimbulkan persoalan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum internasional, khususnya dalam konteks status *belligerent*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum dari pelabelan teroris terhadap kelompok bersenjata di Papua serta menilai kedudukannya dalam perspektif subjek hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, konvensi internasional, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok bersenjata di Papua belum memenuhi kriteria sebagai *belligerent* karena tidak memiliki struktur pemerintahan yang teratur, wilayah kekuasaan yang stabil, serta pengakuan dari pihak ketiga. Pelabelan teroris oleh pemerintah Indonesia memiliki konsekuensi terhadap penerapan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penegakan HAM, dan legitimasi kebijakan keamanan, sehingga perlu diimbangi dengan pendekatan dialogis dan penghormatan terhadap prinsip hukum humaniter internasional.

Kata kunci : Papua, terorisme, *belligerent*, hukum internasional, hak asasi manusia